

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) dimaksudkan untuk digunakan oleh Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (ETAP), yaitu entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan; dan menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purpose financial statement*) bagi pengguna eksternal. Seperti, kreditur, dan lembaga pemeringkat kredit.

SAK ETAP bertujuan untuk menciptakan fleksibilitas dalam penerapannya dan diharapkan memberi kemudahan akses ETAP kepada pendanaan dari perbankan. SAK ETAP merupakan SAK yang berdiri sendiri dan tidak mengacu pada SAK Umum, sebagian besar menggunakan konsep biaya historis; mengatur transaksi yang dilakukan oleh ETAP; bentuk pengaturan yang lebih sederhana dalam hal perlakuan akuntansi dan relatif tidak berubah selama beberapa tahun.

4.1 Penyajian laporan keuangan PDAM Tirta Kota Dumai Bersemai

Penyajian laporan keuangan PDAM Tirta Kota Dumai Bersemai mengacu pada teori-teori yang berlaku dan memberikan tafsiran dan penalaran yang telah mendalam dalam hal praktek terutama dalam pembuatan laporan keuangan untuk memperoleh informasi yang akurat sehubungan data ekonomi perusahaan. Disini penulis akan menjelaskan pokok penyajian laporan keuangan pada PDAM Tirta Kota Dumai Bersemai untuk laporan keuangan di tahun 2016 terutama dengan menunjukkan kebijakan-kebijakan yang menyangkut penyajian laporan keuangan perusahaan sebagai perbandingan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk menerapkan SAK ETAP pada laporan keuangan di tahun 2017. Kebijakan akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum PDAM Tirta Kota Dumai Bersemai dihimbau untuk menggunakan SAK ETAP oleh Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (PERPAMSI) dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan PDAM. Karna dengan menerapkan SAK ETAP akan mempermudah Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dalam menyusun laporan keuangan. SAK-ETAP ini berbeda dari SAK Umum, di mana pengaturan dan penghitungan akan lebih sederhana karena memang ditujukan untuk usaha menengah ke bawah. Dengan penggunaan sistem ini, maka PDAM dapat lebih fokus pada pengembangan sistem air minum dan investasi untuk perluasan layanan tanpa terjebak dalam kerumitan Standar Akuntansi Keuangan.

4.2 Penerapan Penyajian Laporan Keuangan PDAM Tirta Kota Dumai Bersemai Berdasarkan SAK ETAP

Laporan Keuangan PDAM Tirta Kota Dumai Bersemai disajikan terdiri dari,

1. Neraca
2. Laporan Laba Rugi
3. Laporan Perubahan Ekuitas
4. Laporan Arus Kas
5. Catatan Atas Laporan Keuangan.

Tabel VI.1
Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Kota Dumai Bersemay Neraca
Tanggal 31 Desember 2017
Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun 2016
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	2017	2016
ASET			
Aset Lancar			
Kas dan setara kas	2b,3	24.183.228	82.309.208
Piutang usaha	2c,4	1.262.409.600	959.602.100
Piutang lain-lain	2c,5	41.932.500	20.182.500
Uang muka	6	66.000.000	66.000.000
Uang jaminan	7	233.107.250	233.107.250
Pekerjaan dalam Proses	8	0	617.598.200
Persediaan	2d,9	198.780.000	
Jumlah Aset Lancar		1.826.412.578	1.978.799.258
Aset Tidak Lancar	2f,10		
Aset tetap - setelah dikurangi dengan akumulasi penyusutan			
tahun 2017 dan 2016 masing-masing Rp19.566.486.742			
dan Rp14.610.674.512		39.167.130.374	43.773.999.403
Jumlah Aset Tidak Lancar		39.167.130.374	43.773.999.403
JUMLAH ASET		40.993.542.952	45.752.798.661
LIABILITAS DAN EKUITAS			
LIABILITAS			
Liabilitas Jangka Pendek			
Beban masih harus dibayar	11	273.050.141	333.867.677
Hutang usaha	2g,12	974.494.344	582.503.854
Hutang Pembiayaan	2g,13	0	48.417.000
Hutang Pajak	2i,14	0	56.802.040
Jumlah Liabilitas		1.247.544.485	1.021.590.571
EKUITAS	15		
Penyertaan Modal Pemko Dumai		63.623.912.000	63.623.912.000
Laba/(Rugi) ditahan		(23.877.913.533)	(18.892.703.910)
Jumlah Ekuitas		39.745.998.467	44.731.208.090
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS		40.993.542.952	45.752.798.661

SUMBER: Laporan Keuangan PDAM Tirta Kota Dumai Bersemay Tahun 2017

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan tabel 4.1 dapat di jelaskan

1. Kas dan Setara Kas

Pada neraca dalam laporan keuangan PDAM Tirta Kota Dumai Bersemai, kas dan setara kas tersebut dibagi menjadi 3, yaitu saldo kas umum, kas kecil, kas di tangan hal ini telah sesuai dengan berita acara pemeriksaan kas yang dilakukan oleh PDAM Tirta Kota Dumai Bersemai.

2. Piutang usaha

Piutang disajikan PDAM Tirta Kota Dumai Bersemai terdiri dari, Non Niaga, industri, Niaga, Sosial. Dengan jumlah otal keseluruhan piutang usaha sebesar Rp 1.262.409.600,00

3. Piutang lain lain

Piutang lain lain merupakan pinjaman dari karyawan PDAM Tirta Kota Dumai Bersemai sebesar Rp 41.932.500,00

4. Uang muka

Jumlah uang muka pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp66.000.000,- dan 2016 Rp66.000.000 merupakan uang muka Pembelian tanah, namun tidak dilandasi dengan Surat Persetujuan dari Badan Pengawas dan Surat Perjanjian Jual Beli antara Pihak Penjual dengan Perusahaan Daerah Air Minum Tirt Dumai Bersemai, dengan rincian sebagai berikut :

- a. Tanah di Jalan/Gang Bambu, RT.18 Kelurahan Lubuk Gaung Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai seluas 4.810 M2, surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) Nomor : 048/SKGR-SS/2015 tanggal 3 Februari 2015 atas nama Kamaruddin.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. © Aset Tetap

Aset tetap dapat kita lihat di bawah ini dengan perincian sebagai berikut

Tabel VI.2
Rincian Aset

Tahun 2017 :

	2016	Penambahan	Pengurangan	2017
Nilai tercatat				
Tanah	13.641.600.000	0	0	13.641.600.000
Bangunan dan Gedung	7.606.622.160	617.598.200	0	8.224.220.360
Jaringan Pipa dan Pompa	35.948.353.615	7.170.000	0	35.955.523.615
Kendaraan	678.147.400	0	283.850.000	394.297.400
Inventaris kantor	509.950.740	8.025.000	0	517.975.740
Sub jumlah	58.384.673.915	632.793.200	283.850.000	58.733.617.115
Akumulasi penyusutan				
Bangunan dan Gedung	942.481.843	380.331.108	0	1.322.812.951
Jaringan Pipa dan Pompa	13.359.918.674	4.493.544.202	0	17.853.462.875
Kendaraan	160.029.319	44.472.794	26.610.937	177.891.176
Inventaris kantor	148.244.677	64.075.063	0	212.319.740
Inventaris kantor				
Sub jumlah	14.610.674.512	4.982.423.166	26.610.937	19.566.486.742
	35.422.651.154			
Nilai Buku	43.773.999.403			39.167.130.374

SUMBER: Laporan Keuangan PDAM Tirta Kota Dumai Bersemai Tahun 2017

6. Uang jaminan

Jumlah Uang Jaminan pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp233.107.250 dan Rp233.107.250, merupakan uang jaminan pelanggan, sesuai dengan Surat Jaminan PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN) Persero Wilayah Riau KEPRI area Dumai, Nomor : 18250/141223/4613 tertanggal 30 Desember 2014 tentang Persetujuan Perubahan Tarif Daya berlaku mulai tanggal 30 Desember 2014.

7. Persediaan

Pengadaan Water Meter, Pipa dan Accessories PDAM Tirta Dumai Bersemai senilai Rp198.780.000 sesuai dengan surat perintah kerja nomor

: 01/SPK/PPK/PDAM/IV/2016 tanggal 18 April 2016 oleh CV. Bagan Utama Suksesindo, yang direalisasikan pada tahun 2017 dan sampai 31 Desember 2017 belum digunakan.

8. Beban Yang Masih Harus Dibayar

Pada kewajiban lancar dalam neraca PDAM Tirta Kota Dumai Bersemai jumlah saldo yang masih harus dibayar sebesar Rp 273.050.141,00 beban itu terdiri dari gaji/lembur karyawan, beban audit, beban listrik.

9. Hutang Usaha

Hutang usaha per 31 Desember 2017 sebesar Rp 974.494.344, hutang usaha ini terdiri dari;

Tabel VI.3
Rincian Hutang

CV. RA Putra Riau	63,811,700
CV. Jack Consultan	8,000
PT. Meconel Sistem Instrumen	2,000
CV. Ardy Mulya Perkasa	70,537,000
CV. Abmico	32,270,200
CV. Agusta Gemilang	364,102,553
CV. Eka Tri Jaya	62,466,801
CV. Mahkota Teknikal Test	10,000
CV. Ardy Mulya Perkasa	49,305,500
PT. Husna Sentosa Abadi	140,700,000
CV. Wira Cipta Karya	42,500,590
CV. Bagan Utama Suksesindo	148,780,000
Jumlah	974,494,344

Sumber: Laporan Keuangan Pdam Tirta Kota Dumai Bersemai tahun 2017

10. Hutang pembiayaan

Jumlah hutang leasing untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp48.417.000

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

merupakan hutang atas pinjaman uang Tunai kepada PT. Bank Central Asia Cabang Kota Dumai dengan jaminan Mobil Innova BM 4 IR.

11 Hutang pajak

Jumlah huuatgn pajak pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp 56.802.040 merupakan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 22 yang telah dipotong.

12 Modal

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor : 2 Tahun 2014 tanggal 17 Januari 2014 dan telah diundangkan pada lembaran Daerah Kota Dumai tahun 2014 nomo4 2 Seri E menyebutkan bahwa Modal awal PDAM Tirta Dumai Bersemai berupa Aset sebesar Rp53.303.392.000 dan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 4 tahun 2014 tanggal 24 Januari 2014 dengan penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kota Dumai menyeburkan bahwa Nilai penyertaan modal berupa uang tunai sebesar Rp10.320.520.000 yang bersumber dari APBD tahun anggaran 2014.

13 Akumulasi kerugian

Akumulasi kerugian yang dialami perusahaan sampai dengan 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp48.614.258.808 dan Rp42.633.204.622 Dibandingkan dengan jumlah penyertaan (modal) Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 adalah 48,48% dan 68,93%. Sesuai Undang Undang Nomor 32 tahun 2004, PDAM Tirta Dumai Bersemai tidak akan dilikuidasi dan tetap dipertahankan oleh Pemerintah Kota Dumai sehubungan dengan kewajiban Pemerintah Daerah untuk melayani kebutuhan air masyarakatnya.

14. Pendapatan usaha

Jumlah pendapatan PDAM Tirta Dumai Bersemai sebesar Rp2.360.087.500,00 merupakan pendapatan dari, niaga, non niaga, sosial, industri dan instalasi pemerintah, denda, tunggakan tangki.

15. Beban pokok

Jumlah beban pokok yang tercantum dalam laporan laba rugi PDAM Tirta Dumai Bersemai sebesar Rp 6.147.404.192 merupakan beban pokok yang terdiri dari, instalasi pengolahan, distribusi, pemeliharaan dan penyusutan.

16. Beban Umum dan Administrasi

Jumlah beban pokok yang tercantum dalam laporan laba rugi PDAM Tirta Dumai Bersemai sebesar Rp 982,567,322 merupakan beban yang terdiri dari gaji, atk, telepon, listrik dan dll

17. Kewajiban imbalan krja

Perusahaan belum menghitung dan mencatat Kewajiban Imbalan Kerja bagi karyawan sebagaimana yang diisyaratkan dalam SAK ETAP Bab 23 yang mengharuskan perusahaan mencatat imbalan kerja karyawan pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, dan sampai dengan laporan ini diterbitkan, manajemen belum menghitung dan mencatatnya didalam laporan tersebut.

4.3 Analisa Terhadap penyajian Laporan Posisi Keuangan dan CALK

Dari tabel 4.1 ditemukan sebuah permasalahan tentang catatan imbalan kerja yang tidak termasuk kedalam laporan keuangan berupa neraca, sehingga peneliti menemukan sebagai permasalahan pertama. Seharusnya perusahaan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mencatat imbalan kerja sebagaimana yang di isyaratkan dalam Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik pada bab 23 yang mengharuskan perusahaan mencatat imbalan kerja karyawan per 31 Desember 2017, dan sampai laporan keuangan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Kota Dumai Bersemai di terbitkan belum menghitung dan mencatat di dalamnya.

Seharusnya perusahaan harus mencatat imbalan kerja sesuai dengan Penerapan PSAK 24 tentang Imbalan Kerja adalah: Undang-Undang Ketenagakerjaan (UUK) Nomor 13 Tahun 2003 mengatur secara umum mengenai tatacara pemberian imbalan-imbalan di perusahaan, mulai dari imbalan istirahat panjang sampai dengan imbalan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Imbalan-imbalan di UUK tersebut dapat diatur lebih lanjut di Peraturan Perusahaan (PP) atau di Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara Perusahaan dan Serikat Pekerja dan tentu saja merujuk kepada ketentuan di UUK.

Menurut Rizky Hamdani bagian keuangan menyatakan Perusahaan mengakui tidak mencatat dan menghitung kewajiban imbalan pascakerja sebagaimana diatur dalam Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik Bab 23 “Imbalan Kerja”. Pengakuan kewajiban tersebut didasarkan pada ketentuan Undang-undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dalam ketentuan tersebut, Perusahaan diwajibkan untuk membayarkan imbalan kerja kepada karyawannya pada saat mereka berhenti bekerja dalam hal mengundurkan diri, pensiun normal, meninggal dunia dan cacat tetap. Besarnya imbalan pascakerja tersebut terutama berdasarkan lamanya masa kerja dan besarnya kompensasi karyawan pada saat penyelesaian hubungan kerja.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan hasil wawancara, Perusahaan PDAM Tirta Kota Dumai Bersemai tidak melakukan perhitungan dan pencatatan disebabkan perusahaan belum membuat laporan aktuarial dari jasa aktuaris. Sehingga perusahaan tersebut tidak membayarkan imbalan kerja sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Akibatnya total aset jadi rendah karena tidak menghitung jumlah imbalan kerja, dengan demikian seharusnya perusahaan harus menghitung jumlah imbalan kerja dalam setiap akhir tahunnya melalui jasa aktuaris, sehingga perusahaan dapat membayarkan imbalan kerja sesuai dengan hak karyawan.

Permasalahan kedua, Laporan keuangan PDAM Tirta Dumai Bersemai tidak mencatat dan menghitung pada aset tanah Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Dumai Bersemai sehingga berpengaruh pada jumlah aset perusahaan. Hal ini dapat dilihat berdasarkan sertifikat tanah yang tidak dihitung dalam laporan keuangan perusahaan. Akibatnya aset tetap berupa tanah rendah karena tidak tercatat, hal ini dapat kita lihat dari daftar aset tetap yang tercatat dalam laporan keuangan PDAM Tirta Kota Dumai Bersemai berikut daftar aset tetap berupa tanah:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel VI.4
Daftar aset tetap berupa tanah

No Urut	Nama Barang / Aktiva Tetap	Volume	Tahun Perolehan	Nilai Perolehan 1/1-2017	Penambahan Th 2017	Jumlah NP 31/12-2017
I.	TANAH					
1	Tanah di Jalan Jenderal Sudirman SHM No.	10.000 M2		12,850,000,000		12,850,000,000
2	Tanah di Jalan Bukit Timah Km. 7 SHM No.	875 M2		98,000,000		98,000,000
3	Tanah di Jalan Bukit Timah Km. 12 SHM No.	8670 M2		693,600,000		693,600,000
	JUMLAH			13,641,600,000		13,641,600,000

Sumber: Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Kota Dumai

Berdasarkan tabel 4.4 dapat dijelaskan bahwa daftar aset tetap berupa tanah yaitu: (1) Aset berupa tanah dapat kita lihat terdapat yang beralamat di jl Jendral Sudirman Rp 12.850.000.000,00, (2) Tanah yang di jalan Bukit Timah Km. 7 Rp 98.000.000,00, dan (3) Tanah yang di jalan Bukit Timah Km 12 Rp 693.600.000,00

Permasalahan Ketiga, dalam laporan keuangan PDAM Tirta Kota Dumai Bersemai juga tidak mencatat dan menghitung hutang atas pembelian tanah yang dibayar dimuka sebesar Rp 66.000.000,00 akibatnya jumlah utang rendah karna tidak tercatat dalam laporan keuangan.

Menurut Rizky Hamdani bagian keuangan tanah yang yang dimaksud yang berada di jalan/gang bambu, RT 18 Kelurahan Lubuk Gaung Kecamatan Sungai Sembilan tanah ini tidak di catat sebagai aset perusahaan karena tidak di landasi dengan surat persetujuan badan pengawas dan surat perjanjian jual beli antara pihak penjual dengan Perusahaan Daerah Air Minum Kota Dumai Bersemai. Dengan demikian badan pengawas seharusnya membentuk rapat dengan hasil rapat tersebut apabila menyetujui atau tidak menyetujui

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pembelian tanah dan apabila hasil rapat menyetujui pembelian tanah maka perlu di buat surat perjanjian jual beli tanah yang isinya antara lain menetapkan harga prolehan tanah tersebut, dan apabila tidak di setuju maka uang yang dibayarkan kepada pihak tanah tersebut harus di tagih sebesar Rp 66.000.000,00.

Penyelesaian permasalahan kedua dan ketiga memiliki pencatatan yang sama dalam menyelesaikan permasalahan. Berdasarkan hasil wawancara mengenai aset tanah dan utang tidak dicatat sebagai aset perusahaan disebabkan tidak adanya persetujuan badan pengawas dan surat perjanjian jual beli. Berdasarkan PSAK 16 untuk dapat dikapitalisasi ke dalam aset tetap, biaya perolehan awal aset tetap harus memenuhi dua kriteria kapitalisasi, yaitu kemungkinan besar manfaat ekonomis aset akan mengalir ke perusahaan di masa mendatang dan biaya perolehannya dapat diukur secara andal. Sedangkan hutang merupakan suatu kewajiban perusahaan dalam waktu yang lain yang harus dibayar dengan kas barang atau jasa dimasa yang akan datang. Akan tetapi perusahaan tidak mencatat aset tanah dan utang sehingga menjadi sebuah masalah dalam pembuatan laporan keuangan.

Seharusnya pencatatan aset tanah dan utang harus mengikuti prosedur laporan keuangan yang benar, sesuai dengan ketentuan dibawah ini.

Tanah	Rp xxx	
Kas		Rp xxx
Utang		Rp xxx

Sedangkan laporan keuangan PDAM Tirta Dumai Bersemai tidak mengikuti prosedur laporan keuangan yang benar, karena perusahaan mencatat sebagai berikut

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Uang muka
Kas

Rp 66.000.000.00

Rp 66.000.000.00

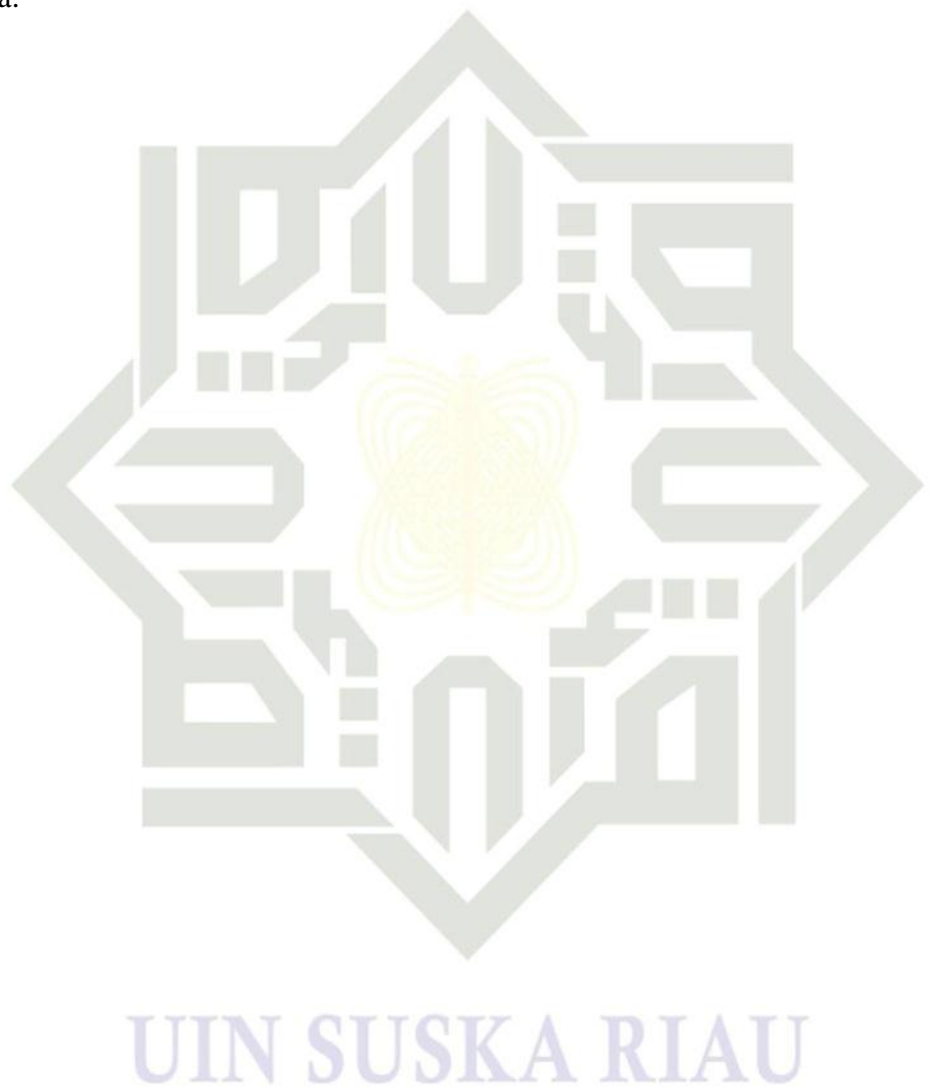
Permasalahan Keempat, laporan keuangan PDAM Tirta Dumai Bersemai tidak mencatat dan menghitung persediaan pada bahan kimia pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Dumai Bersemai sehingga berpengaruh pada jumlah persediaan.. Akibatnya jumlah persediaan yang tercatat dalam laporan keuangan ini rendah sebesar Rp. 1. 723.510.000,00 (terlampir).

Menurut Rizky Hamdani bagian keuangan adanya bahan kimia yang di gudang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Dumai Bersemai namun tidak di catat dalam laporan keuangan karena hal ini juga menyangkut dengan tidak adanya berita acara serah terima barang (PERDA) dari (PEMDA) Kota Dumai tidak ada. Seharusnya dibuatkan (PERDA) pengalihan hak aset dari PEMKO dumai ke PDAM Dumai agar dapat dimanfaatkan sehingga tidak menimbulkan kerugian akibat terlalu lamanya bahan kimia di gudang.

Berdasarkan hasil wawancara bahan kimia yang ada di dalam gudang tidak dicatat dalam laporan keuangan karna tidak adanya berita acara serah terima barang. Seharusnya Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Dumai Bersemai harus membuat berita acara penyerahan bahan kimia.

Menurut IAI (2016) Untuk mengatur perlakuan akuntansi untuk persediaan. Permasalahan pokok dalam akuntansi persediaan adalah penentuan jumlah biaya yang diakui sebagai aset dan perlakuan akuntansi selanjutnya atas aset tersebut sampai pendapatan diakui. Pernyataan ini menyediakan dalam menentukan biaya, pengakuan biaya, nilai realisasi neto dan rumus biaya. Selanjutnya bahan kimia yang dimiliki Perusahaan Daerah

Air Minum Tirta Dumai Bersemai merupakan bagian dari persediaan. Persediaan adalah aset: Tersedia untuk dijual dalam kegiatan pengolahan air di perusahaan. Dalam proses produksi untuk proses penjualan tersebut. Dalam bentuk bahan atau perlengkapan untuk digunakan dalam proses produksi atau pemberian jasa.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.